

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi sektor publik mengalami perkembangan dalam waktu yang begitu singkat. Saat ini telah terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktek akuntansi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga publik, seperti lembaga pemerintah, perusahaan milik negara atau daerah dan berbagai organisasi publik lainnya. Oleh karena itu, terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk melakukan tranparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga tersebut.

Akuntansi berperan pada segi pengelolaan keuangan suatu entitas semakin disadari oleh banyak pihak, baik entitas yang berorientasi laba ataupun non laba. Peran akuntansi paling dasar tentu saja adalah kemampuannya menyajikan berbagai informasi serta jawaban yang berhubungan dengan segala bentuk kegiatan keuangan. Pada dasarnya, entitas nonlaba berbeda dengan entitas bisnis. Walaupun entitas nonlaba tidak bertujuan mencari laba, namun masih bersinggungan dengan persoalan keuangan karena entitas nonlaba mempunyai anggaran, membayar karyawan, membayar rekening listrik serta telepon, dan urusan keuangan lain-lain. Selain itu terdapat karakteristik khusus entitas nonlaba dalam memperoleh sumberdaya yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas operasionalnya.

Kekhususan ini memiliki karakteristik yang menimbulkan jenis transaksi, siklus operasi, pola pengelolaan keuangan, perlakuan akuntansi dan kebutuhan pelaporan keuangan yang berbeda dengan entitas bisnis pada umumnya". (IAI, 2018). Jenis Entitas Nirlaba merupakan entitas yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat yang tidak bertujuan untuk mencari laba (Wardayati & Sayekti, 2021). Entitas nirlaba ini biasanya didirikan oleh masyarakat atau dikelola oleh swasta. Sumber dana yang didapat oleh entitas nirlaba biasanya berasal dari para donator atau penyumbang yang tidak mengharapkan timbal balik atas dana yang diberikan. Organisasi nirlaba pada umumnya memilih, pengurus atau penanggungjawab yang menerima amanat dari para *stakeholdernya*. Terkait

dengan konsep akuntabilitas dimana akuntansi sebagai sarana akuntabilitas maka laporan keuangan perlu disajikan oleh organisasi nirlaba. Alasannya karena dengan laporan keuangan ISAK 35 maka dapat menilai pertanggung jawaban dari pengurus/manajemen atas tugas, kewajiban dan kinerja yang diamanatkan kepadanya. “Organisasi nirlaba semenjak tahun 1997 diatur dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45. Namun mulai tahun 2019 PSAK 45 diganti dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Dengan keluarnya peraturan baru ini maka organisasi nirlaba menyusun laporan keuangannya sesuai dengan (ISAK) 35.

ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) No 35 tentang penyajian laporan keuangan berorientasi nonlaba mulai berlaku efektif 1 Januari 2020. Tujuan utama ISAK No 35 yaitu menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Istilah terjemah kata “*Non For Profit*” semula terdapat dalam PSAK No 45 dirubah oleh DSAK IAI dalam ISAK No 35 menjadi nonlaba dengan dasar bahwa sesungguhnya aktivitas utamanya tidak mencari laba namun bukan berarti tidak menghasilkan laba (nirlaba).

DSAK IAI merupakan interpretasi dari PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan yang memberikan contoh bagaimana entitas berorientasi nonlaba membuat penyesuaian baik; (i) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk pos-pos tertentu dalam laporan keuangan; dan (ii) penyesuaian deskripsi yang digunakan untuk laporan keuangan itu sendiri. ISAK 35 dilengkapi dengan contoh ilustratif dan dasar kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari ISAK 35. Menurut ISAK No 35, laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan asset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Yayasan pendidikan merupakan salah satu badan nirlaba di Indonesia, yayasan pendidikan dibedakan menjadi dua yaitu bergerak di bidang pendidikan formal dan sektor pendidikan non formal. Bagi yayasan, tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan bagi entitas bisnis tujuan

utamanya adalah mencari laba (profit) semata sebagaimana halnya organisasi yang tidak mencari untung dalam menampung, merawat, dan mendidik anak-anak yang tidak di rawat orang tuanya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan isinya selain bersifat mengatur, juga bersifat memaksa. Undang-Undang ini bukan hanya berlaku terhadap yayasan yang didirikan setelah Undang-Undang Yayasan tersebut berlaku, melainkan berlaku pula terhadap yayasan yang ada sebelum Undang-Undang yayasan tersebut ada. Salah satu entitas nirlaba yang menjadi fokus penelitian ini adalah Yayasan Panti Asuhan Rindang Hijau Madani, yang mana merupakan salah satu entitas nirlaba yang ada di Desa Tratakan, Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Yayasan Panti Asuhan Rindang Hijau Madani ini sudah sangat berkembang, maka dari itu, peneliti mengambil objek Yayasan Panti Asuhan Rindang Hijau Madani ini untuk penelitian terkait bagaimana penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standart akuntansi, terutama penyajian laporan keuangan ISAK 35. Yayasan ini memperoleh sumbangan dari penyumbang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang di berikan. Proses pencatatan pada yayasan ini di mulai dari pencatatan pada buku kas untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi ISAK 35 pada Panti Asuhan Rindang Hijau Madani Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

1.2 Rumusan Masalah

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi ISAK 35 pada Yayasan Panti Asuhan Rindang Hijau Madani Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang sebelumnya telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk

menganalisis dan menjelaskan implementasi ISAK 35 pada Panti Asuhan Asuhan Rindang Hijau Madani Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan, dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana implementasi ISAK 35 bila dipraktekkan di dunia kerja,
 - b. Mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan keuangan nirlaba, yang mana selama ini telah di pelajari di bangku perkuliahan,
 - c. Menambah kemampuan penulis untuk lebih baik lagi dalam penulisan karya ilmiah.
2. Bagi Entitas Panti Asuhan

Sebagai bahan masukan untuk menerapkan ISAK 35, agar kedepannya dalam penyajian laporan keuangan lebih baik dan mudah dipahami, terlebih lagi laporan keuangan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada pihak yayasan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya bila ingin meneliti ilmu akuntansi, khususnya di bidang penerapan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan pada entitas nirlaba.